



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJIONO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 646939

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.058.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 662.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 201 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000
4. Tanah Seluas 1249 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000
5. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/106 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 9.100.000**

1. MOTOR, SUZUKI FD 110 XCSD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 400.000
2. MOTOR, YAMAHA 50C (T135HC) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA ACEF1L21B06 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000



4. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 4.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.180.394

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.149.080.394

III. HUTANG Rp. 10.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.138.880.394

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.